



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BEKASI
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NESAN SUJANA
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 417437

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.016.926.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HIBAH TANPA AKTA Rp. 283.908.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 274.800.000
3. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 91.600.000
4. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 481.200.000
5. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 481.200.000
6. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 137.400.000
7. Tanah Seluas 284 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 284.000.000
8. Tanah Seluas 204 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 163.608.000
9. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 84.210.000
10. Tanah Seluas 275 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , LAINNYA Rp. 400.000.000
11. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 335.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	394.000.000
1. MOTOR, HONDA KARISMA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000		
3. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2015, LAINNYA Rp. 160.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	992.741.333
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	4.403.667.333
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.403.667.333

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.